

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)**

Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. Pahlawan No.02 Ranuklindungan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasuruan, 31 Desember 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2019;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

Kata Pengantar

Dasar Hukum

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Ekuitas

C.4.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

E.2. Surplus/Defisit-LO

E.3. Transaksi Antar Entitas

E.3.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

E.3.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

E.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 31 Desember 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp564.386.702,00 atau mencapai 111,08% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp508.087.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp17.477.356.484,00 atau mencapai 97,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.858.738.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp152.793.536.875,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.567.856.492,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp150.224.811.099,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp869.284,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp152.793.536.875,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp529.031.752,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp20.138.046.916,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-19.609.015.164,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp682.942.450,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-18.926.072.714,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp154.134.736.724,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-18.926.072.714,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.584.872.865,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp152.793.536.875,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	508.087.000,00	564.386.702,00	111,08	84.428.198,00
Jumlah Pendapatan		508.087.000,00	564.386.702,00	111,08	84.428.198,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.287.956.000,00	3.266.371.912,00	99,34	3.097.106.705,00
Belanja Barang	B.4.	14.570.782.000,00	14.210.984.572,00	97,53	14.566.353.494,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	0,00	14.566.353.494,00
Jumlah Belanja		17.858.738.000,00	17.477.356.484,00	97,86	17.861.310.199,00

II. NERACA

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	38.554.546,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	-222.500,00	0,00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.1.	38.332.046,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	2.058.619.560,00	1.764.216.890,00
Jumlah Aset Lancar		2.218.071.606,00	1.764.216.890,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	125.576.938.000,00	125.576.938.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	16.620.470.848,00	16.620.470.848,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	29.322.963.683,00	29.322.963.683,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.689.232.680,00	1.689.232.680,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	245.690.000,00	245.690.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	138.947.868,00	138.947.868,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-22.320.960.145,00	-21.224.606.815,00
Jumlah Aset Tetap		151.273.282.934,00	152.369.636.264,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	1.000.000,00	3.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	718.953.680,00	716.953.680,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	- 719.077.253,00	-719.070.110,00
Jumlah Aset Lainnya		876.427,00	883.570,00
Jumlah Aset		151.273.282.934,00	154.134.736.724,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.4.	151.939.157.902,00	154.134.736.724,00
Jumlah Ekuitas		151.939.157.902,00	154.134.736.724,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		153.491.110.967,00	154.134.736.724,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	529.031.752,00	70.837.198,00
JUMLAH PENDAPATAN		529.031.752,00	70.837.198,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.266.371.912,00	3.097.106.705,00
Beban Persediaan	D.3.	9.349.597.059,00	9.249.774.965,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.280.206.034,00	3.207.171.500,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.631.926.981,00	777.060.293,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	431.453.371,00	837.261.496,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	29.100.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.149.242.534,00	2.274.483.746,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.9.	149.025,00	0,00
JUMLAH BEBAN		20.138.046.916,00	19.442.858.705,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-19.609.015.164,00	-19.372.021.507,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	5.505.000,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	-95.100.000,00	-27.356.965,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	772.537.450,00	1.005.572.650,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		682.942.450,00	978.215.685,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-18.926.072.714,00	-18.393.805.822,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	154.134.736.724,00	154.758.160.545,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-18.926.072.714,00	-18.393.805.822,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3.	17.584.872.865,00	17.770.382.001,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4.	-1.341.199.849,00	-623.423.821,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	152.793.536.875,00	154.134.736.724,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar

Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk menjadi Lembaga yang melakukan pengujian standar instrumen ruminansia besar. Untuk mewujudkan tujuan Kantor Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar berkomitmen dengan visi “Menjadi Lembaga Standardisasi Instrumen Ruminansia Besar Terkemuka dan dapat Diandalkan oleh Masyarakat dan Industri”.

Adapun misi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar sebagai berikut:

1. Menerapkan standar yang berkualitas tinggi untuk produk dan layanan yang dihasilkan oleh lembaga, industri dan masyarakat.
2. Menyediakan layanan pengujian, konsultasi dan sertifikasi untuk memastikan produk dan layanan memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Mendorong penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam produksi produk dan layanan pengujian.
4. Menjalinkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya standar dan kualitas produk dan layanan pengujian.
5. Menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi mengenai standar dan sertifikasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

- Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	04
<i>Franchise</i>	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	335.892.000,00	483.087.000,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	25.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah Pendapatan	360.892.000,00	508.087.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.220.071.000,00	3.214.989.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	47.612.000,00
Belanja Lembur	27.885.000,00	25.355.000,00
Belanja Barang Operasional	1.936.160.000,00	1.856.784.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.347.756.000,00	1.023.331.000,00
Belanja Barang Persediaan	8.593.076.000,00	8.947.317.000,00
Belanja Jasa	495.200.000,00	433.377.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.563.960.000,00	1.588.594.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.017.680.000,00	721.379.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja	18.411.788.000,00	17.858.738.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp564.386.702,00 atau mencapai 111,08% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp508.087.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	483.087.000,00	500.636.752,00	103,63
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	25.000.000,00	33.900.000,00	135,60
Pendapatan Lain-Lain	0,00	29.849.950,00	
Jumlah	508.087.000,00	564.386.702,00	111,08

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 111,08% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	500.636.752,00	39.482.198,00	1.168,01
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	33.900.000,00	31.355.000,00	8,12
Pendapatan Lain-Lain	29.849.950,00	13.591.000,00	119,63
Jumlah	564.386.702,00	84.428.198,00	568,48

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp11.685.013.364,00 atau 61,99% dari anggaran belanja sebesar Rp17.587.476.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2024

Uraian	2024		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.287.956.000,00	3.272.428.077,00	99,53
Belanja Barang	14.570.782.000,00	14.210.984.572,00	97,53
Belanja Modal	0,00	0,00	
Total Belanja Kotor	17.587.476.000,00	17.483.412.649,00	97,90
Pengembalian Belanja		6.056.165,00	
Total Belanja	17.587.476.000,00	17.477.356.484,00	97,86

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 1,37% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Barang: di TA 2024 masih terdapat blokir anggaran yang tidak bisa digunakan.
2. Belanja Modal: tidak ada Belanja Modal di TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	3.266.371.912,00	3.097.106.705,00	5,47
Belanja Barang	14.210.984.572,00	14.566.353.494,00	-2,44
Belanja Modal	0,00	197.850.000,00	-100,00
Total Belanja	17.477.356.484,00	17.861.310.199,00	-2,15

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.266.371.912,00 dan Rp3.097.106.705,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,47% dari TA 2023. Hal ini karena adanya penambahan jumlah PNS dan PPPK, serta terdapat kenaikan gaji dan tunjangan beberapa PNS di TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.201.680.633,00	3.073.824.365,00	4,16
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	45.500.444,00	0,00	
Belanja Lembur	25.247.000,00	34.783.000,00	-27,42
Jumlah Belanja Kotor	3.272.428.077,00	3.108.607.365,00	5,27
Pengembalian Belanja Pegawai	6.056.165,00	11.500.660,00	-47,34
Jumlah Belanja	3.266.371.912,00	3.097.106.705,00	5,47

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.210.984.572,00 dan Rp14.566.353.494,00. Realisasi

belanja barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 2,44% dari TA 2023. Hal ini dikarenakan adanya blokir, sehingga anggaran tidak bisa dipakai.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.856.444.007,00	1.813.462.627,00	2,37
Belanja Barang Non Operasional	994.216.812,00	893.121.455,00	11,32
Belanja Barang Persediaan	8.910.951.267,00	9.905.427.638,00	-10,04
Belanja Jasa	429.545.215,00	361.525.768,00	18,81
Belanja Pemeliharaan	1.588.373.900,00	755.554.510,00	110,23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	431.453.371,00	837.261.496,00	-48,47
Jumlah Belanja Kotor	14.210.984.572,00	14.566.353.494,00	-2,44
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	14.210.984.572,00	14.566.353.494,00	-2,44

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp197.850.000,00 Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dari TA 2023 karena TA tidak ada Anggaran untuk Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	197.850.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	197.850.000,00	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	0,00	197.850.000,00	-100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29.655.975,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Bukan Pajak terjadi karena ada Piutang dari Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional TAYL. Adapun Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Kelebihan Pembayaran TJF TAYL	29.805.000,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran TJF TAYL	-149.025,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	29.655.975,00	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.538.200.517,00 dan Rp1.764.216.890,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	430.059.370,00	634.526.250,00
Bahan untuk Pemeliharaan	3.141.147,00	190.640,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.105.000.000,00	1.129.500.000,00
Jumlah	2.538.200.517,00	1.764.216.890,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp125.576.938.000,00 dan Rp125.576.938.000,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang untuk Aset Tanah, sehingga nilai Aset Tanah per 31 Desember 2024 masih sama dengan Nilai Perolehan Aset Tanah per 31 Desember 2023.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.651.292.425,00 dan Rp16.620.470.848,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang untuk Aset Peralatan dan Mesin, sehingga nilai Aset Tanah per 31 Desember 2024 masih sama dengan Nilai Perolehan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	16.620.470.848,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	30.821.577,00
Saldo per 31 Desember 2024	16.651.292.425,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-14.686.848.688,00
Nilai Buku per 31 Desember 204	1.964.443.737,00

Mutasi Tambah peralatan dan mesin adalah berupa transfer masuk sepeda motor trail senilai Rp30.821.577,00 dari satker BSIP PKH.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29.322.963.683,00 dan Rp29.322.963.683,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang untuk Aset Gedung dan Bangunan, sehingga nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 masih sama dengan Nilai Perolehan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.689.232.680,00 dan Rp1.689.232.680,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, sehingga nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 masih sama dengan Nilai Perolehan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp245.690.000,00 dan Rp245.690.000,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah/Kurang untuk Aset Tetap Lainnya, sehingga nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 masih sama dengan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp138.947.868,00 dan Rp138.947.868,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-23.400.253.557,00 dan Rp-21.224.606.815,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16.651.292.425,00	-14.686.848.688,00	1.964.443.737,00
2.	Gedung dan Bangunan	29.322.963.683,00	-7.668.286.549,00	22.156.573.885,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.689.232.680,00	-1.045.118.320,00	644.114.360,00
4.	Aset Tetap Lainnya	245.690.000,00	0,00	245.690.000,00
Akumulasi Penyusutan		47.909.178.788,00	-23.400.253.557,00	24.508.925.231,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp3.000.000,00. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Hak Cipta	1.000.000,00
Jumlah	1.000.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp718.953.680,00 dan Rp716.953.680,00. Aset Lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-719.084.396,00 dan Rp-719.070.110,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Hak Cipta	1.000.000,00	-130.716,00	869.284,00
2.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	716.953.680,00	-716.953.680,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		719.953.680,00	-719.084.396,00	869.284,00

C.4. EKUITAS

C.4. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp152.793.536.875,00 dan Rp154.134.736.724,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp529.031.752,00 dan Rp70.837.198,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	481.062.000,00	18.400.000,00	2.514,47
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0,00	11.425.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.834.752,00	8.252.198,00	55,53
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.235.000,00	1.405.000,00	-12,10
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	33.900.000,00	31.355.000,00	8,12
Jumlah	529.031.752,00	70.837.198,00	646,83

Pendapatan PNBPN pada LO berbeda nilainya dengan Pendapatan PNBPN pada LRA sebesar , karena Pendapatan PNBPN pada LO tidak menghitung Penerimaan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Tahun yang Lalu sebesar Rp29.849.950,00 dan juga Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin pada LO sebesar Rp5.505.000,00 dihitung sebagai Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.266.371.912,00 dan Rp3.097.106.705,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.258.642.600,00	2.142.309.920,00	5,43
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.554,00	33.089,00	-1,62
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	177.165.600,00	156.709.396,00	13,05
Beban Tunj. Anak PNS	45.702.572,00	40.674.936,00	12,36
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	137.265.000,00	140.490.000,00	-2,30
Beban Tunj. PPh PNS	14.454.922,00	4.602.144,00	214,09
Beban Tunj. Beras PNS	129.704.220,00	129.704.220,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	352.582.000,00	356.325.000,00	-1,05
Beban Tunjangan Umum PNS	72.515.000,00	83.915.000,00	-13,59
Beban Gaji Pokok PPPK	34.305.600,00	0,00	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	804,00	0,00	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.200.000,00	0,00	
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040,00	0,00	
Beban Uang Makan PPPK	6.125.000,00	0,00	
Beban Uang Lembur	25.247.000,00	34.783.000,00	-27,42
Jumlah	3.266.371.912,00	3.097.106.705,00	5,47

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.349.597.059,00 dan Rp9.249.774.965,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	9.086.491.122,00	9.128.751.425,00	-0,46
Beban Persediaan Bahan Baku	217.719.539,00	58.634.054,00	271,32

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Lainnya	45.386.398,00	62.389.486,00	-27,25
Jumlah	9.349.597.059,00	9.249.774.965,00	1,08

Beban persediaan bahan konsumsi sebagian besar merupakan pakan ternak (pakan campur, sumber serat, dll), dan bahan konsumsi untuk kegiatan perkantoran (kertas, alat tulis, dll). Beban persediaan bahan baku merupakan bahan baku untuk bahan bangunan (tanah urug, cat, dll) dan bahan baku untuk analisa (N2 Cair, Aseton Teknis, dll). Beban persediaan lainnya adalah berupa ternak yang masuk pada akun persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.280.206.034,00 dan Rp3.207.171.500,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.783.732.007,00	1.674.562.627,00	6,52
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72.712.000,00	138.480.000,00	-47,49
Beban Bahan	40.648.600,00	151.545.030,00	-73,18
Beban Barang Non Operasional Lainnya	953.568.212,00	741.576.425,00	28,59
Beban Langganan Listrik	312.034.222,00	298.883.219,00	4,40
Beban Langganan Telepon	1.562.881,00	1.651.839,00	-5,39
Beban Langganan Air	10.662.812,00	9.630.710,00	10,72
Beban Jasa Konsultan	52.725.000,00	17.760.000,00	196,88
Beban Sewa	6.826.500,00	0,00	
Beban Jasa Profesi	2.700.000,00	3.700.000,00	-27,03
Beban Jasa Lainnya	43.033.800,00	29.900.000,00	43,93
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	139.481.650,00	-100,00
Jumlah	3.280.206.034,00	3.207.171.500,00	2,28

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.631.926.981,00 dan Rp777.060.293,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	441.242.760,00	260.458.170,00	69,41
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	519.962.850,00	110.937.840,00	368,70
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	540.569.171,00	321.406.665,00	68,19
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	46.857.120,00	24.386.198,00	92,15
Beban Persediaan Suku Cadang	83.295.080,00	59.871.420,00	39,12
Jumlah	1.631.926.981,00	777.060.293,00	110,01

Beban Pemeliharaan di Tahun 2024 mengalami peningkatan karena banyak gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin yang rusak yang harus dilakukan pemeliharaan/perbaikan karena faktor usia. Beban Persediaan suku cadang sebagian besar merupakan suku cadang alat pengolahan ternak dan tanaman (cangkul, sabit, dll) dan suku cadang alat laboratorium (ependorf, gelas ukur, dll). Beban Persediaan untuk pemeliharaan sebagian besar untuk pemeliharaan gedung dan bangunan (sapu, slang, dll).

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp431.453.371,00 dan Rp837.261.496,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	420.403.371,00	826.665.496,00	-49,14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.050.000,00	10.596.000,00	4,28
Jumlah	431.453.371,00	837.261.496,00	-48,47

Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pada TA 2024 Pagu Perjalanan Dinas banyak yang terblokir.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing

sebesar Rp29.100.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi. Beban ini muncul karena Satker menerima Transfer Masuk berupa Bibit Pagi Gogo dari BB Pengujian Standar Instrumen Padi senilai Rp600.000,00 serta Sapi senilai Rp28.500.000,00. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	29.100.000,00	0,00	
Jumlah	600.000,00	0,00	

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.149.242.534,00 dan Rp2.274.483.746,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.044.890.596,00	1.168.081.451,00	-10,55
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.003.793.509,00	1.003.793.510,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.163.311,00	5.163.311,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	81.821.363,00	81.821.363,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	13.559.469,00	13.559.468,00	0,00
Beban Amortisasi Hak Cipta	14.286,00	14.286,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	2.050.357,00	-100,00
Jumlah	2.149.242.534,00	2.274.483.746,00	-5,51

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp149.025,00 dan Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	149.025,00	0,00	
Jumlah	149.025,00	0,00	

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.505.000,00	0,00	
Beban Pelepasan Aset	-95.100.000,00	-27.356.965,00	247,63
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	59.654.950,00	13.591.000,00	338,93
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	712.882.500,00	991.981.650,00	-28,14
Jumlah	682.942.450,00	978.215.685,00	-30,18

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran Uang Makan pada Bulan Desember 2023, Tunjangan Fungsional serta Piutang Yang belum Tertagih.
- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya berasal Penerimaan akibat Sapi Afkir yang dipindah dari Aset menjadi Persediaan untuk selanjutnya sapi tersebut akan dilelang. Pendapatan ini akan hilang saat SK Penghapusan BMN terbit.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp154.134.736.724,00 dan Rp154.758.160.545,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp-18.926.072.714,00 dan Rp-18.393.805.822,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.584.872.865,00 dan Rp17.770.382.001,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.477.356.484,00
Diterima dari Entitas Lain	-564.386.702,00
Transfer Keluar	-12.000.000,00
Transfer Masuk	683.903.083,00
Jumlah	17.584.872.865,00

E.3.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp-564.386.702,00 sedangkan DKEL sebesar Rp17.477.356.484,00.

E.3.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 Besar Transfer Masuk adalah sebesar Rp683.903.083,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp-12.000.000,00.

E.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-1.341.199.849,00 dan Rp-623.423.821,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp152.793.536.875,00 dan Rp154.134.736.724,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

- Terdapat 7 kali Revisi DIPA yang sangat berpengaruh terhadap beberapa kegiatan, bahkan banyak kegiatan terblokir anggarannya kecuali Kegiatan Gaji dan Tunjangan serta Kegiatan Operasional Perkantoran. DIPA awal Rp18.411.788.000,00 dan DIPA terakhir per 6 Juni 2024 Rp 14.481.788.000,00. Adapun rincian perubahan DIPA sebagai berikut:

DIPA	TANGGAL	PAGU	PERUBAHAN (NAIK/TURUN)	KETERANGAN
Awal	24/11/2023	18.411.788.000,00	0,00	DIPA Awal LPSI RB
Revisi 1	05/01/2024	14.381.788.000,00	4.030.000.000,00	Refokusing Anggaran. Beberapa Kegiatan dihapus karena tidak mempunyai anggaran.
Revisi 2	23/01/2024	14.381.788.000,00	0,00	Blokir Anggaran.
Revisi 3	16/02/2024	14.381.788.000,00	0,00	Revisi POK
Revisi 4	26/03/2024	14.381.788.000,00	0,00	Revisi POK
Revisi 5	19/04/2024	14.381.788.000,00	0,00	Revisi Halaman III DIPA
Revisi 6	24/04/2024	14.381.788.000,00	0,00	Revisi POK
Revisi 7	06/06/2024	14.481.788.000,00	100.000.000,00	Revisi POK dan Penambahan Kegiatan Baru
Revisi 8	10/07/2024	14.481.788.000,00	0,00	Revisi Halaman III DIPA dan POK
Revisi 9	26/07/2024	17.547.476.000,00	3.065.688.000,00	Penambahan Anggaran Pakan Ternak
Revisi 10	17/09/2024	17.587.476.000,00	40.000.000,00	Penambahan Anggaran Belanja Pegawai
Revisi 11	02/10/2024	17.587.476.000,00	0,00	Revisi POK
Revisi 12	22/10/2024	17.787.476.000,00	200.000.000,00	Penambahan Kegiatan Baru
Revisi 13	07/11/2024	17.858.738.000,00	71.262.000,00	Revisi Target PNBP
Revisi 14	17/11/2024	17.858.738.000,00	0,00	Revisi Penghematan Belanja Perjalanan Dinas
Revisi 15	13/12/2024	17.858.738.000,00	0,00	Revisi POK

- Terdapat Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu dari Belanja Pegawai, adapun rincian sebagai berikut:

No.	ASAL TRANSAKSI	TANGGAL SETOR	NILAI SETORAN	KETERANGAN
1.	511151	09/01/2024	720.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Umum an A. Chusaini dan Woro Abidah lewat Potongan SPM
2.	511129	23/01/2024	1.684.950,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Makan

				Bulan Desember 2023
3.	511124	01/02/2024	5.040.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia
4.	511124	07/02/2024	4.400.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Pritha
5.	511124	07/02/2024	4.400.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Yeni
6.	511124	07/02/2024	4.400.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Almira
7.	511124	09/08/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia
8.	511124	01/09/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan September 2024
9.	511124	01/10/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan Oktober 2024
10.	511124	01/11/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan Nopember 2024
11.	511124	13/11/2024	4.575.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Pritha
12.	511124	01/12/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan Desember 2024
13.	511124	03/12/2024	1.830.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Yeni

•

- Terdapat 4 Kegiatan Belanja Modal yang menjadi KDP di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar dengan total Rp138.947.868,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Lokasi	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Ket.
1	Renovasi Fasilitas Kantor	Kantor Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	703/PL.020/H.5.4/03/2022	19.145.621,00	Pekerjaan Fisik tidak dilakukan karena adanya Refokusing Anggaran
2	Pengadaaan Konsultan Perencana Pembangunan <i>Conecting Gangway</i>	Kantor Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	89/PL.020/H.5.4/01/2023	71.913.650,00	Kontrak Selesai, Pekerjaan Fisik tidak dilakukan karena adanya Refokusing Anggaran
3	Pengadaan Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan Kantor	Kantor Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	108/PL.020/H.5.4/01/2023	18.138.597,00	Kontrak Selesai, Pekerjaan Fisik tidak dilakukan karena adanya Refokusing Anggaran
4.	Pengadaaan Konsultan Perencana Pembangunan <i>Conecting Gangway</i>	Kantor Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	182/PL.020/H.5.4/01/2023	29.750.000,00	Pengembangan KDP Pembangunan <i>Connecting Gangway</i> dari Tahun 2023
Total				138.947.868,00	

- Terdapat perbedaan jumlah pendapatan yang tercatat di LRA sebesar Rp564.386.702,00 dengan di LO sebesar Rp 529.031.752,00, sehingga selisihnya sebesar Rp35.354.950,00. Berikut rincian perbedaannya:

No	KODE AKUN	TANGGAL SETOR	NILAI SETORAN	KETERANGAN/ASAL TRANSAKSI
1.	425911	09/01/2024	720.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Umum an A. Chusaini dan Woro Abidah lewat Potongan SPM
2.	425911	23/01/2024	1.684.950,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2023
3.	425911	01/02/2024	5.040.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia
4.	425911	07/02/2024	4.400.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Pritha
5.	425911	07/02/2024	4.400.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Yeni
6..	425911	07/02/2024	4.400.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an

				Almira.
7.	425911	09/08/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia
8.	425122	21/08/2024	5.505.000,00	Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin
9.	425911	01/09/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan September 2024
10.	425911	01/10/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan Oktober 2024
11.	425911	01/11/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan Nopember 2024
12.	425911	13/11/2024	4.575.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Pritha
13.	425911	01/12/2024	560.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Mutia dari Potongan SPM Gaji Induk Bulan Desember 2024
14.	425911	03/12/2024	1.830.000,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional an Yeni
Total			35.354.950,00	

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Satuan Kerja : Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 Lokasi : Pasuruan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian								
ADA.111	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	150.000.000	146.316.235	97,54	3	3	Standar	100,00	Kegiatan sudah selesai dilakukan
AEF.104	Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disebarluaskan	100.000.000	0	0,00	100	0	Orang	0,00	
BJA.101	Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diuji	220.000.000	0	0,00	300	0	Produk	0,00	
CAG.104	Sarana Laboratorium Standardisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	210.000.000	0	0,00	1	0	Unit	0,00	
	Subtotal	680.000.000	146.316.235	21,517	404	3,00		0,74	
	Refocusing Anggaran								
ADA.111	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	150.000.000	146.316.235	97,54	3	3	Standar	100,00	
AEF.104	Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang	0	0		0	0	Orang	0,00	Pada DIPA Revisi I, kegiatan dihapus, karena

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024

	disebarluaskan								tidak ada anggaran akibat refocusing.
BJA.101	Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diuji	0	0		0	0	Produk	0,00	Pada DIPA Revisi I, kegiatan dihapus, karena tidak ada anggaran akibat refocusing.
CAG.104	Sarana Laboratorium Standardisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0		0	0	Unit	0,00	Pada DIPA Revisi I, kegiatan dihapus, karena tidak ada anggaran akibat refocusing.
	Total	150.000.000	146.316.235	45,71	3	3		100,00	

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Satuan Kerja : Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 Lokasi : Pasuruan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar								
CAG.104	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.500.000.000	0	0,00	100	0	Unit	0,00	
	Subtotal	3.500.000.000	0	0,00	100	0,00	Unit	0,00	
	Refocusing Anggaran								
CAG.104	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0,00	0	0	Unit	0,00	Pada DIPA Revisi I, kegiatan terhapus, karena tidak ada anggaran akibat refocusing.
	Total	0	0	0,00	0	0	Unit	0,00	

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Satuan Kerja : Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Pasuruan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian								
EBA.962	Layanan Umum	936.764.000	727.701.666	77,68	1	1	Layanan	100,00	Terdapat blokir anggaran sebesar 22,25% dari pagu anggaran. Kegiatan selesai dilakukan.
EBA.994	Layanan Perkantoran	16.381.974.000	16.359.517.403	99,86	1	1	Layanan	100,00	Kegiatan selesai dilakukan.
EBD.95 2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	170.000.000	103.994.897	61,17	1	1	Layanan	100,00	Anggaran terblokir sebesar 38,82% dari Pagu.
EBD.95 3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	170.000.000	126.826.378	74,60	1	1	Layanan	100,00	Terdapat blokir Anggaran sebesar 25,38% dari Pagu.
EBD.95 5	Layanan Manajemen Keuangan	50.000.000	12.999.905	26,00	1	1	Layanan	100,00	Anggaran Kegiatan Terblokir sebesar 74% dari Pagu.
	Subtotal	17.708.738.000	17.331.040.249	97,867	5	5,00	Layanan	100,00	
	Refocusing dan Penambahan Pagu Anggaran								
EBA.962	Layanan Umum	936.764.000	727.701.666	77,68	1	1	Layanan	100,00	
EBA.994	Layanan Perkantoran	16.381.974.000	16.359.517.403	99,86	1	1	Layanan	100,00	Terdapat tambahan Anggaran

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024

									Pakan Ternak sebesar 3M
EBD.95 2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	170.000.000	103.994.897	61,17	1	1	Layanan	100,00	
EBD.95 3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	170.000.000	126.826.378	74,60	1	1	Layanan	100,00	Terdapat penambahan anggaran dari kegiatan baru sebesar 100 juta.
EBD.95 5	Layanan Manajemen Keuangan	50.000.000	12.999.905	26,00	1	1	Layanan	100,00	
	Total	17.708.738.000	17.331.040.249	45,71	5	5,00	Layanan	100,00	